

Klasifikasi Sektor Informal Dan Hubungannya Dengan Penggunaan Ruang Pada Jalan Letjend Hertasning – Tun Abdul Razak, Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Classification of the Informal Sector and Its Relationship with the Use of Space on Jalan Letjend Hertasning – Tun Abdul Razak, Makassar City & Gowa Regency, South Sulawesi

Andi Alief Muhammad*, Yori Herwangi

Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*E-mail: andialief20@gmail.com

Diterima: 15 April 2025/Disetujui: 30 Juni 2025

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk menganalisis tipologi sektor informal dan keterkaitannya dengan pemanfaatan ruang di sepanjang Jalan Letjend Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak, yang terletak di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran (mixed methods), yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sektor informal. Data dikumpulkan melalui survei lapangan, wawancara mendalam, dan observasi langsung terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor informal, khususnya PKL, memiliki karakteristik yang beragam berdasarkan demografi, fisik, dan ekonomi. Mayoritas PKL beroperasi di sektor makanan dan minuman, memanfaatkan trotoar, badan milik jalan, dan emperan toko sebagai lokasi usaha. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan ruang oleh PKL sering kali tidak sesuai dengan peruntukannya, yang mengakibatkan penyempitan jalur pejalan kaki, kemacetan lalu lintas, dan penurunan estetika kota. Keterkaitan antara tipologi PKL dan pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa keberadaan PKL berkontribusi terhadap dinamika ekonomi lokal, namun juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif dalam penataan sektor informal, termasuk penyediaan zona khusus bagi PKL dan penguatan regulasi untuk menjaga ketertiban dan kebersihan ruang publik.

Kata Kunci: Tipologi Sektor Informal, Pemanfaatan Ruang, Pedagang Kaki Lima, Kota Makassar, Kabupaten Gowa

Abstract. This research aims to analyze the typology of informal sector and its relationship with space utilization along Jalan Letjend Hertasning to Jalan Tun Abdul Razak, located in Makassar City and Gowa Regency, South Sulawesi. The method used in this research is a mixed methods approach, which combines quantitative and qualitative analysis to gain a comprehensive understanding of the informal sector phenomenon. Data was collected through field surveys, in-depth interviews, and direct observation of street vendors operating in the area. The results show that the informal sector, especially street vendors, have diverse characteristics based on demographic, physical, and economic factors. The majority of street vendors operate in the food and beverage sector, utilizing sidewalks, road shoulders, and shopfronts as business locations. This study also found that the utilization of space by street vendors is often not in accordance with their designation, resulting in narrowing pedestrian paths, traffic congestion, and a decrease in city aesthetics. The relationship between street vendor typology and space utilization shows that the presence of street vendors contributes to the dynamics of the local economy, but also poses challenges in public space management. Therefore, this study recommends the need for more inclusive and adaptive policies in structuring the informal sector, including the provision of special zones for street vendors and strengthening regulations to maintain order and cleanliness of public spaces.

Keywords: Informal Sector Typology, Space Utilization, Street Vendors, Makassar City, Gowa Regency

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Kota Makassar, yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, mengalami perkembangan dan pembangunan yang pesat. Pertumbuhan ini berkaitan erat dengan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, baik dari penduduk tetap maupun pendatang yang mencari pekerjaan di kota ini. Akibatnya, kepadatan penduduk di Makassar mengalami dampak yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 1,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2023 (BPS Kota Makassar, 2024).

Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan, dengan estimasi mencapai 799.999 jiwa pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Gowa, 2024). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kedekatan wilayahnya dengan Kota Makassar, yang mendorong berkembangnya fungsi kawasan tertentu. Berdasarkan PerPres No.55 (2011) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata, disebutkan bahwa sebagian wilayah Kabupaten Gowa, termasuk 11 kecamatan seperti Kecamatan Somba Opu tempat Jalan Tun Abdul Razak berada, merupakan bagian dari kawasan strategis tersebut. Perkembangan ini menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan baru dengan beragam aktivitas pendukung pembangunan wilayah. Menurut de Soto (1989) dalam *The Other Path: The Economic Answer to Terrorism*, sektor informal muncul sebagai respons atas berbagai hambatan regulasi dan birokrasi yang menghalangi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses sektor formal. De Soto menegaskan bahwa pelaku sektor informal bukanlah pelanggar hukum, melainkan individu yang berusaha bertahan hidup dalam keterbatasan sistem ekonomi. Fenomena ini umum dijumpai di kawasan perkotaan, salah satunya melalui aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal mendorong masyarakat memilih sektor informal sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sektor ini dicirikan oleh kemudahan akses, fleksibilitas waktu dan lokasi, skala usaha kecil, serta ketergantungan pada sumber daya lokal (Rachbini & Hamid, 1995).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menciptakan dilema tersendiri dalam dinamika perkotaan, karena memiliki dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, sektor informal ini berperan dalam menyerap tenaga kerja, khususnya saat terjadi krisis ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Selain itu, PKL juga menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Namun di sisi lain, keberadaan PKL sering kali menimbulkan permasalahan tata ruang kota. Penataan yang tidak teratur menciptakan kesan kumuh dan mengganggu fungsi ruang publik seperti trotoar, jalan, dan ruang terbuka. Akibatnya, ruang kota yang

semestinya digunakan untuk kepentingan umum berubah menjadi area perdagangan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang. Kompleksitas masalah ini diperparah oleh belum adanya kebijakan tata ruang yang jelas untuk sektor informal. Berbeda dengan sektor formal yang telah diatur secara tegas, sektor informal berkembang tanpa regulasi yang memadai, sehingga sulit dikendalikan dalam kerangka perencanaan kota.

Perkembangan pembangunan di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Sektor perdagangan dan jasa menjadi indikator utama yang mendorong pertumbuhan wilayah. Pada tahun 2023, Kota Makassar mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan (4,51%) dan rata-rata nasional (5,05%) (Nusharatu, 2024). Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp226,90 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp155,95 juta atau setara US\$8.607,08, Kota Makassar menunjukkan peningkatan daya saing di tingkat nasional dan global, didukung oleh sektor perdagangan, industri, dan konstruksi. Sementara itu, Kabupaten Gowa mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82%, menjadikannya wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sulawesi Selatan (Wahab, 2024). Capaian ini mencerminkan keberhasilan kedua wilayah dalam mengoptimalkan sektor perdagangan dan jasa untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.

Salah satu kawasan yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam sektor perdagangan dan jasa adalah koridor Jalan Letjend Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak. Di wilayah ini terjadi alih fungsi lahan dari kawasan perumahan menjadi pusat kegiatan perdagangan, yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha. Namun demikian, pemanfaatan ruang di koridor ini turut menghadapi tantangan akibat ekspansi kota menuju wilayah pinggiran. Perkembangan sektor perdagangan, baik formal maupun nonformal, turut terdorong oleh keterbatasan lahan di pusat Kota Makassar serta kedekatannya dengan Kabupaten Gowa. Hal ini menyebabkan pergeseran fungsi ruang ke kawasan perbatasan, termasuk sepanjang koridor yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Gowa. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan dinamika spasial, tetapi juga menciptakan perubahan dalam struktur sosial ekonomi kawasan (Hidayat et al., 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum adanya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang koridor Jalan Letjend Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak telah menimbulkan berbagai permasalahan tata ruang. Ketidakteraturan ruang kota, kemacetan lalu lintas, serta konflik pemanfaatan ruang antara sektor formal dan informal menjadi konsekuensi dari absennya pengaturan yang terintegrasi. Keberagaman tipologi pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang koridor

Jalan Letjen Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak mencerminkan pola penggunaan ruang yang kompleks dan adaptif terhadap karakteristik fisik serta fungsi sosial-ekonomi jalan tersebut. PKL dengan jenis dagangan berbeda, seperti makanan cepat saji, buah musiman, pakaian, hingga jasa informal, memanfaatkan ruang-ruang residual seperti trotoar, bahu jalan, dan area depan pertokoan sebagai lokasi usaha. Kondisi ini menunjukkan urgensi untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana dinamika penggunaan ruang oleh sektor informal tersebut mempengaruhi fungsi utama koridor jalan, baik sebagai jalur mobilitas maupun sebagai ruang interaksi sosial perkotaan.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis tipologi sektor informal dan keterkaitannya dengan pemanfaatan ruang di sepanjang Jalan Letjend Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak, yang terletak di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Metode Penelitian

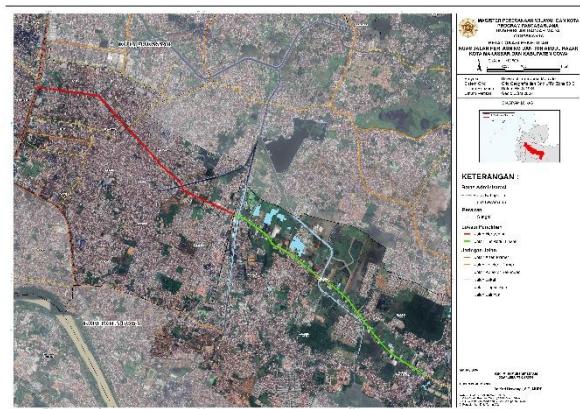
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods merupakan penggabungan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji

Pendekatan *mixed methods* dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel numerik, seperti jumlah dan distribusi pedagang kaki lima, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memahami pemanfaatan ruang, seperti tipologi dari pedagang kaki lima keterkaitannya dengan pemanfaatan ruang.

b. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini ditemukan bahwa ruas Jalan Letjend Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak merupakan jalur penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang mengalami peningkatan aktivitas. Peningkatan ini disebabkan oleh maraknya bangunan komersial serta aktivitas pedagang informal yang memanfaatkan ruas atau badan milik jalan sebagai tempat berjualan. Selain itu, pertumbuhan aktivitas ekonomi, perkantoran, dan pendidikan di kawasan tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya kepadatan di sepanjang ruas jalan yang diteliti.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Jalan Letjend Hertasning – Tun Abdul Razak



Gambar 2. Kondisi PKL di Kedua Lokasi yang memakai ruang publik yaitu Trotoar dan Bahu Jalan

c. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup para pedagang kaki lima yang berjualan di koridor Jalan Letjend Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak. Para pedagang tersebut menjalankan usahanya secara menetap, baik pada pagi, siang, maupun malam hari. Jumlah total populasi dalam penelitian ini adalah 202 pedagang dengan berbagai jenis usaha.

Sedangkan untuk total Dari total populasi sebanyak 202 pedagang kaki lima, penelitian ini menggunakan metode *proportional random sampling*, teknik sampling ini merupakan salah satu variasi dari *probability sampling* dengan mengambil 50% dari populasi sebagai sampel, sehingga diperoleh 101 responden. Pemilihan sampel ini dilakukan secara proporsional dan mempertimbangkan keterwakilan jenis usaha, lokasi berdagang, serta waktu operasional. Strategi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang representatif mengenai karakteristik, persebaran, serta dinamika aktivitas pedagang kaki lima di sepanjang koridor Jalan Letjend Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak.

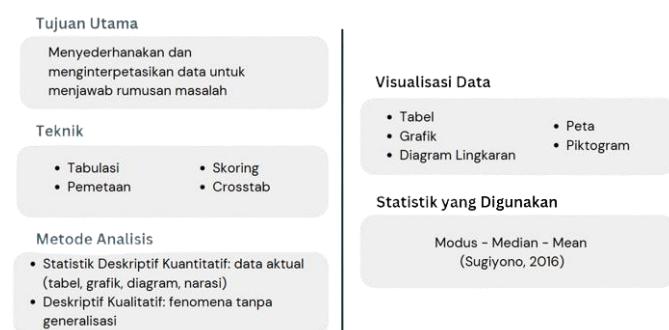
d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menginterpretasikan temuan lapangan

secara sistematis guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan disederhanakan melalui proses tabulasi dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, peta, grafik, dan visualisasi lainnya agar lebih mudah dipahami. Teknik pengolahan data meliputi tabulasi, pemetaan, scoring, dan crosstab, yang mendukung pemahaman menyeluruh terhadap karakteristik pedagang kaki lima di kawasan studi.

Analisis dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif, yang bertujuan menggambarkan data primer dari kuesioner tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi. Data disajikan dalam bentuk grafik, tabel frekuensi, dan narasi deskriptif guna menampilkan proporsi dan distribusi variabel penelitian secara jelas. Menurut Yunus (2010) data primer ini dikombinasikan dengan data sekunder yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif non-statistik, seperti dokumentasi lapangan dan observasi visual, untuk memberikan gambaran kondisi aktual di sepanjang koridor pedestrian.

Selanjutnya, metode analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena empiris yang terjadi di lapangan saat proses pengumpulan data berlangsung. Penyajian hasil dilakukan melalui narasi deskriptif yang didukung dengan grafik batang, diagram lingkaran, pikrogram, serta perhitungan statistik sederhana seperti modus, median, dan rata-rata (Sugiyono, 2016). Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi ruang dan karakter sosial ekonomi pedagang kaki lima di koridor Jalan Letjend Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak.



. Gambar 3. Teknik Pengolahan Data

Hasil dan Pembahasan

Pada hasil temuan dari penelitian serta pembahasan yang mengacu dari hasil analisis tipologi sektor informal dan keterkaitannya dengan pemanfaatan ruang, meliputi keterkaitan aktivitas sektor informal dengan penggunaan ruang, penggunaan ruang oleh pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Letjend Hertasning – Tun Abdul Razak, pola penyebaran dan pelayanan dari pedagang kaki lima.

a. Keterkaitan Aktivitas Sektor Informal Dengan Penggunaan Ruang

Aktivitas pedagang kaki lima dalam memanfaatkan ruang sepanjang koridor jalan sangat dipengaruhi oleh sejumlah indikator spasial dan sosial. Lokasi yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, seperti kawasan pendidikan, tempat ibadah, pusat pemerintahan, serta zona perdagangan formal, cenderung menjadi titik konsentrasi pedagang kaki lima. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi sektor informal berorientasi pada potensi daya tarik ruang dan peluang pasar, di mana aktivitas jual beli dapat berlangsung secara intensif karena kedekatan terhadap arus lalu lintas manusia maupun kendaraan. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang oleh PKL tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola tertentu berdasarkan fungsi ruang dan keterjangkaunya oleh konsumen.

Keberadaan pedagang kaki lima memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat. Namun demikian, aktivitas ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi ruang publik, seperti terganggunya aksesibilitas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Selain potensi konflik pemanfaatan ruang, persoalan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengelolaan ruang kota yang berkelanjutan.

Tipologi pedagang kaki lima di koridor Jalan Letjend Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama.

- Tipologi 1 mencerminkan pedagang dengan sarana sederhana seperti gerobak kecil di ruang terbatas ($1-3 \text{ m}^2$), umumnya menjual makanan dan beroperasi di siang hari tanpa fasilitas pendukung.
- Tipologi 2 lebih fleksibel, menggunakan kendaraan seperti motor atau mobil yang dimodifikasi, dengan pola pelayanan yang berpindah dan lokasi strategis di area lalu lintas padat.
- Tipologi 3 menempati ruang semi permanen seperti kios atau lapak yang disewa dari toko, dilengkapi fasilitas dasar dan mengikuti jam operasional toko. Sementara itu,
- Tipologi 4 bersifat lebih permanen dengan izin resmi, fasilitas lengkap, dan menempati zona khusus seperti ruang terbuka publik menggunakan kontainer kecil atau lapak tetap. Masing-masing tipologi memiliki keunggulan, seperti lokasi strategis dan potensi pendapatan, namun juga tantangan seperti risiko penertiban, konflik ruang, dan keterbatasan fasilitas. Modal usaha bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp10 juta, tergantung skala dan bentuk usaha.



Gambar 4. Tipologi PKL Berdasarkan Jenis Ruang Yang Digunakan

b. Penggunaan Ruang Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Letjend Hertasning – Tun Abdul Razak

Koridor Jalan Letjend Hertasning – Tun Abdul Razak adalah jalur penghubung penting di Provinsi Sulawesi Selatan, berfungsi sebagai jalan kolektor primer dengan arus lalu lintas yang padat. Di sepanjang jalan ini, aktivitas perekonomian didominasi oleh pedagang kaki lima (PKL), yang juga menjadikan kawasan ini sebagai pusat pelayanan umum, termasuk pendidikan dan peribadatan. Pada jam-jam tertentu, kepadatan aktivitas meningkat karena banyaknya PKL yang berjualan di berbagai lokasi, seperti trotoar dan badan milik jalan.

Pemanfaatan ruang oleh PKL sering kali melanggar peraturan yang ada, seperti penggunaan trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki. Hal ini bertentangan dengan regulasi yang mengatur hak pejalan kaki atas fasilitas publik. Lemahnya penegakan regulasi menyebabkan PKL tetap menduduki ruang perkotaan tanpa pengawasan yang memadai, mengganggu pengguna jalan, dan menciptakan kesan kumuh yang merusak estetika kota. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pemanfaatan ruang oleh PKL berdasarkan tipologi yang mencakup pola penyebaran, intensitas aktivitas, dan kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku.

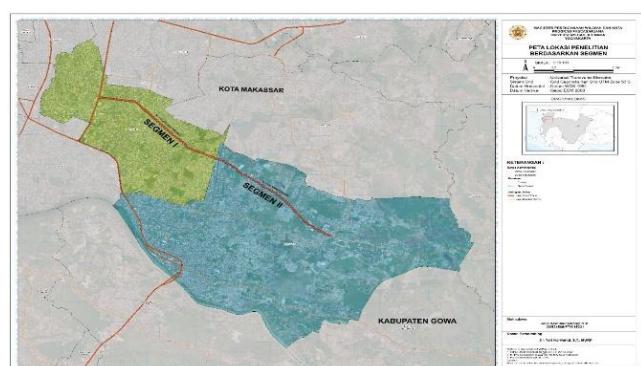
a) Tipologi pedagang kaki lima berdasarkan segmen jalan

Tipologi pedagang kaki lima (PKL) di koridor Jalan Letjend Hertasning dan Jalan Tun Abdul Razak menunjukkan variasi yang mencerminkan karakteristik ruang dan kegiatan ekonomi informal di dua wilayah administrasi yang berbeda.

- Segmen I (Jalan Letjend Hertasning - Kota Makassar), jenis dagangan yang ditemukan meliputi makanan/minuman, kelontong, jasa, dan jenis usaha lainnya. Sarana dagang yang digunakan bervariasi, seperti tenda, kios/lapak, gerobak, dan mobil. Waktu operasional mayoritas berlangsung pada siang hari, dengan lama berjualan lebih dari 8 jam untuk jenis makanan/minuman dan kelontong, sedangkan jasa dan usaha lainnya memiliki waktu

berjualan lebih fleksibel, yaitu antara 4 hingga 8 jam. Lokasi aktivitas perdagangan dilakukan di berbagai jenis ruang, seperti emperan toko, ruang terbuka publik, trotoar, dan badan milik jalan. Luas ruang yang digunakan bervariasi, dari yang kecil (1×1 meter) hingga yang lebih luas (6×5 meter). Pola pengelompokan di wilayah ini didominasi oleh PKL yang bercampur dengan jenis lain, meskipun ada juga yang berkelompok.

- Sementara itu, pada Segmen II (Jalan Tun Abdul Razak - Kabupaten Gowa), jenis usaha yang ditemukan relatif sama, namun dengan konfigurasi ruang yang sedikit berbeda. Pedagang makanan/minuman dan jasa umumnya menggunakan mobil sebagai sarana dagang, sedangkan pedagang kelontong dan jenis usaha lainnya menggunakan kios/lapak dan tenda. Waktu operasional lebih bervariasi, mulai dari pagi hingga siang hari, dengan lama berjualan rata-rata antara 4 hingga 8 jam, dan sebagian lebih dari 8 jam. Lokasi dagang tersebar di badan milik jalan, emperan toko, dan trotoar, dengan ukuran ruang yang digunakan berkisar antara 2×3 meter hingga 5×3 meter. Pengelompokan pedagang di segmen ini sebagian besar bercampur dengan jenis usaha lain, meskipun terdapat beberapa yang berkelompok dengan jenis yang sama.



Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian Berdasarkan Segmen Jalan

- b) Tipologi PKL hubungannya dengan penggunaan ruang Dalam konteks ruang kota dan ekonomi informal, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki peran signifikan, baik dalam menyediakan akses ekonomi masyarakat maupun dalam memanfaatkan ruang sisa di kawasan perkotaan. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, PKL dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipologi berdasarkan karakteristik lokasi berjualan, luas ruang yang digunakan, tingkat aksesibilitas, dampak sosial dan ekonomi, serta sistem pengelolaan limbah yang diterapkan.

- Tipologi 1: PKL penggunaan ruang di trotoar

PKL dalam tipologi pertama umumnya menempati ruang trotoar, terutama di sekitar kawasan perkantoran, pendidikan, pasar, hingga pusat kota. Mereka memanfaatkan ruang terbatas antara 1–3 meter persegi, yang sering kali mengganggu jalur pejalan kaki. Aksesibilitasnya sangat tinggi karena mudah dijangkau oleh pengguna jalan, terutama pejalan kaki.

Secara sosial dan ekonomi, keberadaan PKL ini memberikan alternatif barang dengan harga terjangkau dan biaya operasional rendah, namun menimbulkan dampak negatif seperti terganggunya estetika ruang kota, kerusakan fasilitas umum di trotoar, serta potensi konflik dengan pengguna jalan kaki. Pengelolaan limbah di tipologi ini masih bersifat sederhana, umumnya hanya dengan menyediakan trashbag secara mandiri. Minimnya fasilitas pembuangan menyebabkan risiko pencemaran di area trotoar tetap tinggi.

- Tipologi 2: PKL penggunaan ruang di badan milik jalan

Tipologi kedua mencakup PKL yang menempati bahu jalan di sekitar kawasan pasar, institusi pendidikan, perkantoran, serta permukiman padat. Luas ruang yang digunakan relatif lebih besar, yaitu antara 2–6 meter persegi, bahkan kerap mengambil sebagian jalur kendaraan. Tingkat aksesibilitas berada pada kategori sedang hingga tinggi, karena walaupun mudah dijangkau, lokasi ini sering menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas akibat pengendara yang berhenti mendadak untuk berbelanja.

Dari segi dampak sosial ekonomi, PKL ini dinilai cukup menguntungkan karena mendekati pasar konsumen langsung, namun pengelolaan ruang dan lalu lintas perlu perhatian serius. Dalam hal pengelolaan limbah, PKL ini bergantung pada petugas kebersihan jalan, sementara volume limbah plastik dan kemasan sekali pakai cukup tinggi, sehingga sering kali sampah berserakan di sekitar lokasi.

- Tipologi 3: PKL penggunaan ruang di emperan toko

Pada tipologi ketiga, PKL memanfaatkan emperan atau halaman toko di kawasan komersial. Mereka menggunakan sarana seperti tenda semi permanen berukuran 5–9 m² atau gerobak berukuran 2–6 m². Tingkat aksesibilitas tinggi karena berada di kawasan yang dilalui pejalan kaki dan konsumen toko formal.

Secara sosial, terjadi simbiosis mutualisme antara PKL dan toko formal, namun tak jarang juga muncul konflik kepentingan terhadap ruang. Nilai properti yang lebih rendah menjadi alasan pemanfaatan ruang ini. Aktivitas ekonomi berjalan

dinamis, menciptakan ruang sosial yang hidup. Dalam hal pengelolaan limbah, PKL tipologi ini memanfaatkan fasilitas toko atau menyediakan tempat sampah sendiri. Namun, bagi yang tidak memiliki fasilitas, limbah minyak dari aktivitas memasak sering dibuang langsung ke drainase, menimbulkan pencemaran lingkungan.

- Tipologi 4: PKL penggunaan ruang di ruang terbuka publik

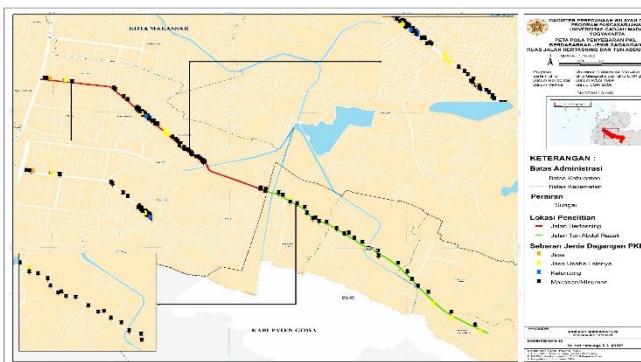
Tipologi keempat mencakup PKL yang berjualan di ruang terbuka publik, seperti lapangan sepak bola atau alun-alun. Ruang yang digunakan rata-rata sekitar 3–4 meter persegi per unit PKL. Aksesibilitas termasuk sedang hingga tinggi, tergantung pada pengelolaan ruang tersebut. Lokasi ini cenderung lebih fleksibel dan menampung banyak aktivitas ekonomi informal.

PKL dalam kategori ini memberi nilai tambah terhadap ruang publik, karena dapat menciptakan suasana hidup dan aktif. Secara ekonomi, memberikan kontribusi terhadap penguatan sektor informal. Namun, ada potensi konflik antar pedagang dalam memperebutkan lokasi strategis. Pengelolaan limbah pada tipe ini lebih memadai karena umumnya tersedia fasilitas umum, tetapi tetap membutuhkan sistem pengelolaan terpadu untuk mengurangi potensi pencemaran dari sampah yang dihasilkan secara kolektif. Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima

Sistem penyebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) di koridor Jalan Letjend Hertasning – Tun Abdul Razak umumnya mengikuti pola linier memanjang sepanjang jalan, memanfaatkan trotoar, bahu jalan, emperan toko, dan ruang publik lainnya. Pola ini terbentuk karena tingginya aksesibilitas dan fungsi koridor sebagai penghubung utama antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

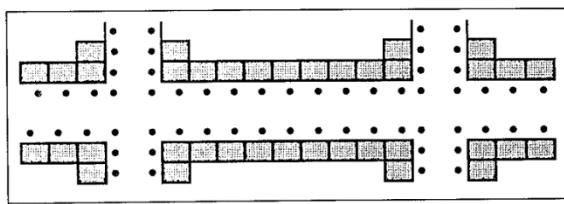
PKL menawarkan beragam jenis barang dagangan yang mudah diakses, terutama oleh pengendara yang dapat berhenti langsung di lokasi. Namun, pemanfaatan ruang trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki kini terganggu akibat alih fungsi menjadi area berdagang. Dampaknya, pejalan kaki terpaksa menggunakan badan jalan, diperparah dengan keberadaan meja, kursi, dan kendaraan pembeli yang mempersempit ruang.

Tata letak dagangan yang linier memudahkan pengunjung dalam melihat dan memilih produk, menciptakan lingkungan belanja yang lebih nyaman meskipun mengorbankan fungsi ruang publik secara semestinya.



Gambar 6. Pola Penyebaran PKL Berdasarkan Jenis Dagangan

Aktivitas sektor formal di wilayah koridor Jalan Letjend Hertasning – Tun Abdul Razak berpengaruh besar terhadap pola kegiatan PKL. Para pedagang cenderung berlokasi di area strategis seperti jalur pejalan kaki dan titik keramaian untuk menarik konsumen (Ambarwaty, 2003).



Gambar 7. Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima dengan Pola Linier

Berdasarkan jenis dagangan, terdapat empat kategori utama: makanan/minuman (77%), usaha lainnya seperti pakaian dan aksesoris (12%), jasa (6%), dan kelontong (5%). Pola persebaran cenderung merata sepanjang koridor, dengan dominasi pedagang makanan/minuman yang hadir di hampir setiap segmen jalan, menunjukkan keterkaitan kuat antara lokasi strategis dan jenis usaha yang dijalankan.

Terdapat disparitas persebaran PKL antara sisi barat dan timur koridor Jalan Letjend Hertasning – Tun Abdul Razak. Sisi barat, khususnya segmen dari Jalan A.P. Pettarani ke Jalan Tun Abdul Razak (A1), menunjukkan jumlah PKL yang lebih banyak dibandingkan dengan sisi timur dari arah Sultan Alauddin Gowa ke Letjend Hertasning (A2). Perbedaan ini dipengaruhi oleh karakteristik pemanfaatan lahan di kedua sisi jalan, di mana sisi barat dinilai lebih strategis dan potensial bagi aktivitas perdagangan kaki lima.

Tata letak linier dagangan PKL di sepanjang trotoar mempermudah akses visual dan fisik bagi pengunjung, termasuk anak-anak dan pekerja. Penyusunan barang yang rapi menciptakan lingkungan perdagangan yang nyaman dan teratur, sehingga meningkatkan kualitas pengalaman berbelanja.

Pada segmen A2 (dari arah Tun Abdul Razak menuju Jalan Letjend Hertasning), PKL mengelompok berdasarkan jenis dagangan dan memanfaatkan bahu jalan serta trotoar. Aktivitas berlangsung pada pukul 18.00–23.00 WITA dan seringkali menimbulkan kemacetan akibat parkir kendaraan pembeli yang mempersempit ruang jalan. Kepadatan aktivitas memperlihatkan tingginya interaksi ekonomi, namun berdampak negatif pada kelancaran lalu lintas.

Di segmen A1 (Jalan Hertasning menuju Tun Abdul Razak), pedagang buah-buahan berjualan secara berkelompok menggunakan mobil sebagai sarana usaha dan memanfaatkan bahu jalan. Aktivitas perdagangan cenderung sepi pada waktu tertentu, namun meningkat signifikan pada jam-jam sibuk seiring tingginya volume kendaraan dan pembeli yang berhenti di lokasi.

Pedagang kaki lima di lokasi ini umumnya beraktivitas pada sore hingga malam hari, menggunakan ruang yang terbatas. Mereka telah menetap di tempat tersebut, yang didominasi oleh pedagang makanan dan minuman. Moda yang digunakan bervariasi, termasuk mobil, gerobak, dan tenda.



Gambar 8. Pedagang Kaki Lima Jenis Usaha Lainnya (Sepatu&Pakaian) Dengan Pola Mengelompok

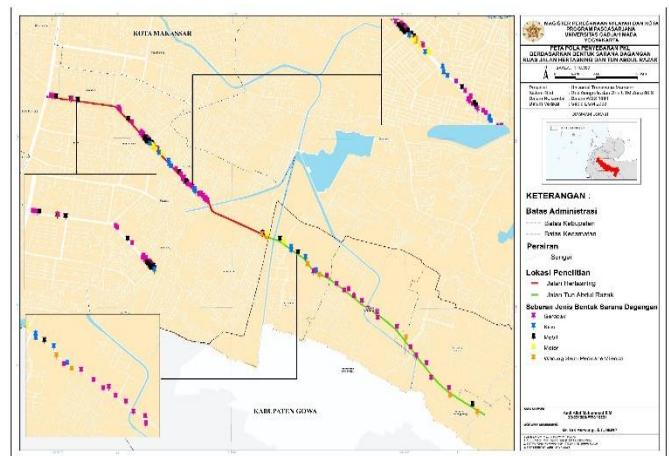


Gambar 9. PKL Jenis Usaha Dengan Pola Mengelompok

c) Pola Pelayanan Pedagang Kaki Lima

Menurut McGee & Yeung (1977), pola pelayanan pedagang kaki lima (PKL) dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan sarana fisik yang digunakan, yaitu: PKL menetap, setengah menetap, dan tidak menetap. PKL menetap menggunakan sarana dagang permanen seperti kios atau lapak. PKL setengah menetap berjualan di lokasi tertentu namun berpindah setelah jam operasional usai, biasanya memakai gerobak, kios beroda, atau kereta. Sementara itu, PKL tidak menetap terus berpindah tempat menggunakan alat sederhana seperti gerobak dorong, keranjang, atau pikulan, dan kerap bekerja sama dengan pedagang sejenis.

PKL yang berjualan secara berjajar mengikuti alur trotoar atau jaringan jalan membentuk pola aglomerasi linier. Penempatan ini dipengaruhi oleh popularitas kawasan serta visibilitasnya terhadap landmark setempat, sehingga mendukung aktivitas perdagangan dan mempermudah pengaturan arus pejalan kaki maupun kendaraan. Dalam penelitian ini, pola pelayanan PKL memanfaatkan ruang secara menetap meskipun menggunakan sarana dagang mobile, seperti mobil, motor, atau gerobak. Oleh karena itu, pola pelayanan dapat dikategorikan sebagai menetap dan setengah menetap di sepanjang koridor. Pemanfaatan ruang sangat bergantung pada jenis moda yang digunakan: PKL dengan gerobak umumnya menempati trotoar, sedangkan yang menggunakan kendaraan cenderung berjualan di bahu jalan karena karakteristiknya yang semi-permanen.



Gambar 10. Peta Pola Penyebaran PKL Berdasarkan Bentuk Sarana

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tipologi sektor informal di sepanjang koridor Jalan Letjend Hertasning hingga Jalan Tun Abdul Razak, dengan fokus pada karakteristik pedagang kaki lima (PKL). Tipologi PKL diklasifikasikan berdasarkan jenis dagangan, bentuk sarana dagang, pola penyebaran, dan pola pelayanan. Mayoritas PKL bergerak di sektor makanan dan minuman, memanfaatkan ruang seperti trotoar, bahu jalan, dan emperan toko. Beberapa menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana berjualan, menunjukkan kecenderungan pola menetap dan setengah menetap sesuai dengan karakter ruang dan mobilitas pelanggan. Selain itu, terdapat keterkaitan erat antara tipologi PKL dan pemanfaatan ruang publik. PKL cenderung memilih lokasi dengan aksesibilitas tinggi yang strategis secara ekonomi. Namun, aktivitas mereka turut memengaruhi tata ruang kota, seperti menyempitnya jalur pejalan kaki, menurunnya kualitas visual lingkungan, serta meningkatnya kemacetan akibat parkir kendaraan pembeli di bahu jalan.

Daftar Pustaka

- BPS. (2024a). Kabupaten Gowa dalam Angka.
- BPS. (2024b). Kota Makassar Dalam Angka. Badan Pusat Statistik, Kota Makassar Tahun 2024.
- Hidayat, S., Tato, S., & Syafri. (2021). Tata Guna Lahan & Transportasi Wilayah Peri-Urban Mamminasata Studi Kasus Koridor Ruas Jalan Hertasning-Tun Abdul Razak (Vol. 1).
<http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/796>
- McGee, T. G., & Yeung, Y. (1977). Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy. International Development Research Centre.
<https://books.google.co.id/books?id=HX6wAAAAIAAJ>
- Nusharatu, H. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Makassar Lampau dan Nasional.

- <https://news.detik.com/berita/d-7660199/pertumbuhan-ekonomi-makassar-lampaui-sulsel-dan-nasional>
- PerPres No.55. (2011). Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Dan Takalar (Vol. 53, Nomor 9).
- Rachbini, D. J., & Hamid, A. (1995). Sektor Informal Perkotaan. Jakarta: LP3ES.
- Soto, H. de. (1989). The other path: The economic answer to terrorism.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
- Wahab, S. Z. S. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Gowa Tertinggi Kedua di Sulsel, Capai 5,82 Persen di 2023. Tribun Timur Gowa.
<https://makassar.tribunnews.com/2024/11/15/pertumbuhan-ekonomi-gowa-tertinggi-kedua-di-sulsel-capai-582-persen-di-2023?>
- Yunus, H. S. (2010). Metodologi penelitian wilayah kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 251.